



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI KAMIS, 14 MARET 2013



DAFTAR ISI

Layanan Bandara	1
Mega Proyek	2
Monorel	3
KA Bandara	4
Trans-Sumatera	5
Layanan Pelabuhan	6



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas ☐ Media Indonesia ☐ Koran Tempo ☒ Bisnis Indonesia
☐ Republika ☐ Sinar Harapan ☐ Suara Pembaruan ☐ Pikiran Rakyat
☐ Rakyat Merdeka ☐ Seputar Indonesia ☐ Investor Daily ☐ Kontan ☐ Lain-lain,
☐ Suara Karya ☐ Neraca ☐ Jurnal Nasional ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Proses Pengiriman Kargo Dipangkas	<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah menargetkan memangkas waktu pengurusan dokumen kargo ekspor impor di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menyusul peluncuran pelayanan National Single Window (NSW) Airportnet di bandara itu- Penerapan NSW Airportnet itu terkait dengan persiapan Asean Economic Community 2015- Arus Ekspor Impor melalui Bandara Soekarno-Hatta naik 19,3%- NSW Airportnet bisa sederhanakan proses pengurusan barang					

► LAYANAN BANDARA

Proses Pengiriman Kargo Dipangkas

JAKARTA—Pemerintah menargetkan memangkas waktu pengurusan dokumen kargo ekspor impor di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menjadi maksimal 1 hari dari sebelumnya 2 hari menyusul peluncuran pelayanan National Single Window (NSW) Airportnet di bandara itu.

Berliana Elisabeth S.
berlianaelizabeth@bisnis.com

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan target itu bertujuan meningkatkan daya saing pengiriman kargo ekspor impor dibandingkan dengan negara lain.

"Kalau bisa 1 hari atau bahkan langsung selesai prosesnya dalam hitungan jam kenapa harus 2 hari. Semoga dengan diresmikannya NSW ini maka proses akan bisa

lebih cepat," katanya saat meresmikan NSW Airportnet di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Rabu (13/3).

Menghub menjelaskan penerapan pelayanan NSW Airportnet di bandara tersebut di Indonesia itu terkait dengan persiapan Asean Economic Community 2015.

Dalam Asean Economic Community, menurutnya, telah ditetapkan NSW masing-masing negara diintegrasikan ke dalam Asean Single Window. "Nah, NSW Airportnet ini diimplementasikan melalui instruksi atau komitmen Kemenko Perekonomian dengan menyusun tim persiapan," jelasnya.

Sepanjang tahun lalu, arus barang ekspor impor melalui Bandara Soekarno-Hatta mencapai 663.366 ton atau naik 19,3% dibandingkan dengan 2011 yang hanya sebanyak 555.899 ton.

Menghub menilai sarana dan prasarana pengiriman kargo harus dimutakhirkan untuk mendukung percepatan proses layanan terhadap arus barang ekspor impor

Mangindaan juga mengajak pemangku kepentingan terkait di bandara bekerja sama menyukseskan NSW Airportnet.

Diren Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Henry Bakti S. Gumay menyatakan pihaknya bekerja sama dengan pengelola gudang untuk pelaksanaan NSW Airportnet.

Nantinya, dia menargetkan proses pengurusan dokumen barang dengan berat di bawah 10 ton tidak lebih dari 2 jam, sedangkan barang antara 10 ton dan 50 ton hanya perlu waktu 3 jam.

"Adapun, untuk barang di atas 50 ton perlu waktu maksimal 4 jam. Ini target kita dengan NSW Airportnet ini," tuturnya.

LEBIH SEDERHANA

Diren Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengharapkan penesman NSW Airportnet bisa menyederhanakan proses pengurusan barang.

"Aman untuk masyarakat kita. Kalau ada barang yang diluang atau karantina maka akan lebih cepat direspon oleh petugas."

Pada masa mendatang, imbuhnya, NSW Airportnet akan dikembangkan di seluruh bandara.

Direktur Utama PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) Adji Gunawan berharap penggunaan sistem itu mempercepat pengiriman kargo di Bandara Soekarno-Hatta.

"Tulu proses pengurusan kargo ekspor impor di Bandara Soekarno-Hatta masih menggunakan kertas,

sekarang digantikan elektronik, hal ini jelas lebih cepat. Kita juga keluar biaya banyak," ujarnya.

Mangindaan juga menyatakan NSW Airportnet akan diterapkan di empat bandara utama lainnya selain Bandara Soekarno-Hatta.

Keempat bandara itu yakni Juanda Surabaya, Polonia Medan, Hasanuddin Makassar, dan Ngurah Rai Denpasar. NSW Airportnet merupakan layanan terpadu yang mengintegrasikan layanan 15 instansi dalam satu sistem layanan.

Untuk membangun NSW Airportnet di Bandara Soekarno-Hatta, imbuhnya, Kemenhub menganggarkan Rp7 miliar.

Kepala Sub Bagian Humas dan KSLN Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Yanesi Rosita mengatakan implementasi dari sistem itu melibatkan beberapa unit kerja terkait.

Unit kerja itu yakni komunitas bandara dan stakeholder user/outsourcing seperti PT Unex, PT Gapura Kargo, PT Garuda Kargo, PT JAS Kargo.

Sistem itu menghasilkan pengolahan data dan informasi berupa cargo tracking dan status, daftar timbun, flight information system (FIS), rute penerbangan dan flight approval (FA).

"Perwujudan sistem ini merupakan tindak lanjut komitmen para pemimpin negara-negara Asean dalam Declaration of Asean Concord II [Bali Concord II] tentang visi integrasi ekonomi dalam membentuk Asean Economic Community." ■

► **National Single Window Airportnet di Bandara Soekarno-Hatta diumumkan.**

► **Arus kargo ekspor impor melalui Bandara Soekarno-Hatta naik 19,3%.**

► **NSW Airportnet bisa sederhanakan proses pengurusan barang.**



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input checked="" type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des																			

2013

<input type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Bisnis Indonesia
<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat
<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Kontan
<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Neraca	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Indopos
			<input type="checkbox"/> Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
3 Investor Minati Deep Tunnel	<ul style="list-style-type: none">- Jakarta membutuhkan terowongan raksasa di dalam tanah untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah- Deep tunnel akan dibangun sepanjang 26 km dengan jalur mulai dari Balai Kambang hingga Pluit			Rp.16 triliun		

► MEGAPROYEK

3 Investor Minati Deep Tunnel

JAKARTA—Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan sudah ada tiga investor yang berminat menggarap proyek terowongan bawah tanah (*deep tunnel*) senilai Rp16 triliun.

"Sudah tiga [investor], ini lain lagi. Yang ini [investor Jerman] langsung membawa orang tekniknya. Yang paling jagoan ngedor di dunia, paling nomor satu," ujarnya, Rabu (13/3).

Dia menyatakan hal itu sesuai menerima pemaparan investor asal Jerman yang ingin berinvestasi dalam pembangunan proyek *deep tunnel*. Jokowi enggan menyebutkan nama-nama investor yang telah menyatakan minatnya

untuk megaprojek tersebut.

Menurutnya, pemaparan yang disampaikan investor asal Jerman itu cukup bagus, namun Pemprov DKI masih melihat yang lain juga.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan terowongan raksasa di dalam tanah untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah.

Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan *smart tunnel* yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Rencananya, *deep tunnel* akan membentang dari MT Haryono, Jakarta Selatan sampai Pluit di Jakarta Utara. Diperkirakan proyek tersebut membutuhkan biaya

mencapai Rp16 triliun.

BIAYA MEMBENGKAK

Namun, pemerintah memperkirakan kebutuhan biaya konstruksi *multi-purpose deep tunnel* akan membengkak, mencapai Rp26 triliun, dari sebelumnya Rp16 triliun, sehingga kemungkinan pemerintah akan mencari opsi proyek alternatif lainnya.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hassan mengatakan pembangunan terowongan bawah tanah tersebut akan menggunakan teknologi *tunnel boring machine*.

Dia menjelaskan teknologi tersebut sangat berkembang. Saat

ini, jika pembangunan terowongan bawah tanah berkilat ke Korea Selatan, maka akan menelan biaya Rp26,5 triliun.

"Akan tetapi di Singapura, per kilomernya dengan diameter 19 meter hanya membutuhkan dana Rp1 triliun. Artinya kalau pakai yang Singapura kita bisa dapat jauh lebih besar dan lebih murah," jelasnya, Senin (4/3).

Deep tunnel akan dibangun sepanjang 26 km dengan jalur mulai dari Balai Kambang hingga Pluit. Hassan menjelaskan fase tersebut akan berada di bawah jalur kereta api untuk menghindari fondasi bangunan tinggi. (Emanuel T. Hayon/Zulfizal)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input checked="" type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des																			

2013

<input type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Bisnis Indonesia
<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat
<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Kontan
<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Neraca	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Indopos
			<input type="checkbox"/> Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Balikpapan Gandeng Pemerintah Dongying	<div>- Pembangunan monorel itu didasarkan ketertarikan investor dan kondisi lalu lintas di lapangan</div> <div>- Nantinya pemkot Balikpapan akan membantu memfasilitasi agar proyek tersebut bisa terealisasi sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan kota</div>				Pemkot Balikpapan	

► MONOREL

Balikpapan Gandeng Pemerintah Dongying

BALIKPAPAN—Pemerintah Kota Balikpapan menggandeng Pemerintah Kota Dongying, China membangun monorel di Balikpapan guna mengurangi kemacetan lalu lintas di kota itu.

Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang mengatakan pembangunan monorel itu didasarkan ketertarikan investor dan kondisi lalu lintas di lapangan.

Nantinya, menurutnya, monorel itu akan dibangun pada jalur sibuk guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

"Nantinya kalau benar terealisasi yang berinvestasi dari Pemerintah Dongying juga dari swasta. Jadi, ada dua pihak," ujarnya usai penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) antara Pemkot Balikpapan dan Pemerintah Dongying, Rabu (13/3).

Rombongan Pemerintah Dongying datang ke Balikpapan dipimpin Wakil Walikota Dongying Zhang Zui. Sebelumnya, Pemkot

Balikpapan juga telah berkunjung ke Dongying saat Wali Kota dijabat Imdaad Hamid.

Setelah penandatanganan LOI itu, Heru menjelaskan pihaknya akan memberikan draf usulan sektor apa saja yang layak investasi selain proyek monorel seperti pariwisata, seni dan budaya serta pendidikan.

Heru mengungkapkan Pemerintah Dongying segera mengkaji pembangunan monorel beserta rute yang akan dilalui.

Nantinya, dia melanjutkan Pemkot Balikpapan akan membantu memfasilitasi agar proyek tersebut bisa terealisasi sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan kota.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Buihanuddin Solong menambahkan pembangunan monorel bisa mengurangi penggunaan kendaraan di Balikpapan.

Dia menilai proyek monorel di Balikpapan dibangun dari Bandara

Sepinggang hingga ke Manggar

"[Selain itu] ke KM 13 di utara dan ke selatan juga. Dengan demikian, masyarakat bisa memilih moda transportasi yang sesuai dengan selera," katanya.

Pemkot Balikpapan siap membantu proses pembebasan tanah di di ruas jalan yang akan dilalui jalur monorel.

"Langkah selanjutnya, Pemkot Balikpapan hanya tinggal mengajukan draf usulan lokasi untuk pembangunan monorel tersebut," ujarnya.

Dongying merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Shandong, China. Kota itu memiliki kemiripan dengan Balikpapan sebagai kota untuk pengolahan minyak.

Wakil Wali Kota Dongying Zhang Zui menyatakan kemiripan itu bisa menguntungkan kedua belah pihak dalam mengembangkan ekonomi regional.

Dia menyatakan serang Pemkot

Balikpapan menyepakati kerja sama membangun monorel yang bisa dijadikan landasan kerja sama lanjutan pada masa mendatang.

Selain Balikpapan, Pemkot Surabaya juga berinisiatif membangun monorel melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).

Pembangunan monorel yang mengajak swasta bisa membuat anggaran Pemkot Surabaya lebih efisien, sehingga dananya dapat dialokasikan ke sektor lain seperti penanggulangan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pembangunan kota di China termasuk monorel berkembang pesat karena pemerintah setempat menerapkan metode KPS.

"Surabaya ingin mengadopsinya dengan membangun proyek monorel karena tidak mungkin proyek besar tersebut didanai oleh pemerintah sendirian," ujarnya.

(Rachmed Subiyanto)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☒ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
KA Bandara Ditarget Beroperasi Februari 2014	- Pengerjaan rel ganda dari Duri sampai Tangerang sudah selesai dilakukan. Sementara untuk sinyal kereta masih menunggu rampungnya pengerjaan rel yang dikerjakan PT. KAI dari Batu Ceper, Tangerang sampai ke Bandara		2014		PT. KAI PT. Angkasa Pura II	
	-					

KA Bandara Ditarget Beroperasi Februari 2014

JAKARTA-Pemerintah mengklaim pengerjaan proyek Kereta Api Commuter Line Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta masih sesuai target dan diprediksi rampung 2014 mendatang.Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono menyatakan, pengerjaan rel ganda dari Duri sampai Tangerang sudah selesai dilakukan. Sementara untuk sinyal kereta, pihaknya masih menunggu rampungnya pengerjaan rel yang dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dari Batu Ceper,Tangerang sampai ke Bandara.

"Jadi intinya ada tiga komponen pengerjaan. Yang pertama dikerjakan Ditjen Kereta api, yaitu, jalur ganda Duri-Tangerang. Komponen berikutnya dikerjakan PT KAI yakni, pembangunan rel Batu Ceper-Bandara, dan satu lagi pembangunan stasiun kereta di dalam bandara. Nah yang ini dilakukan oleh Angkasa Pura II. Jadi dua yang dikerjakan BUMN dan satu Ditjen KA. Sejauh ini targetnya sama pada Februari 2014. Soft operation lah istilahnya," katanya di gedung

Karena ada tiga pihak yang mengerjakan proyek ini, Bambang memastikan akan terus berkoordinasi untuk menjaga agar pengerjaan rampung sesuai target, di antaranya seperti yang akan dilakukan pada Jumat (15/3).

"Jumat besok mau cek lagi perkembangan terakhir dengan Wakil Menteri BUMN. Saya akan koordinasi dengan Wamen BUMN Pak Yasin (Mahmuddin Yasin, Red). Kita akan bertemu karena beliau yang pegang soal ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, pertengahan 2012 lalu pemerintah merencanakan membangun dua jalur kereta api menuju bandara. Jalur pertama Commuter Line, berada di sebelah selatan yang akan melalui Manggarai-Tanah Abang-Duri-Grogol-Bojong Indah-Kalideres-Tanah Tinggi hingga bandara Soekarno-Hatta.

Sementara jalur utara terdapat Express Line yang akan melalui Manggarai-Tanah Abang-Duri-Angke-Pluit dan sejajar dengan jalan tol bandara menuju Soe-

mlnberkoran @ (Sip/pan)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas ☐ Media Indonesia ☐ Koran Tempo ☐ Bisnis Indonesia
☐ Republika ☐ Sinar Harapan ☐ Suara Pembaruan ☐ Pikiran Rakyat
☐ Rakyat Merdeka ☐ Seputar Indonesia ☐ Investor Daily ☐ Kontan ☐ Lain-lain,
☐ Suara Karya ☐ Neraca ☐ Jurnal Nasional ☒ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Penunjukan Langsung Cacat Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Rencana pemerintah menunjuk langsung PT. Utama Karya untuk membangun dan mengelola jalan tol trans-Sumatera dinilai cacat hukum dan menimbulkan potensi korupsi di dalamnya- Penunjukan langsung itu juga dinilai melanggar prinsip-prinsip efisiensi anggaran negara dan menutup kesempatan BUMN lainnya atau konsorsium badan usaha lainnya yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengelola jalan tol					

TRANS-SUMATRA

Penunjukan Langsung Cacat Hukum

JAKARTA—Rencana pemerintah menunjuk langsung PT Utama Karya untuk membangun dan mengelola jalan tol trans-Sumatra dinilai cacat hukum dan menimbulkan potensi korupsi di dalamnya.

Dimas Novita S. & Mia Citra D.
redaksi@bisnis.com

Pasalnya, pembangunan proyek tanpa sistem tender itu menyalahtan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apalagi, nilai investasi proyek itu juga cukup besar.

Pemerintah telah menunjuk Utama Karya untuk membangun dan mengelola proyek itu karena dinilai tidak layak secara finansial.

Direktur Pengembangan Centre for Information Development Studies (CIDES) yang juga dosen FISIP Universitas Nasional Hilmi R. Ibrahim mengatakan sistem penunjukan langsung itu melanggar Pasal 51 Ayat 1 UU No. 38/2004 tentang Jalan.

Dalam UU itu disebutkan pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

Selain melanggar aturan UU, katanya, langkah itu juga melanggar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Karena itu, dia mengusulkan agar prosesnya bisa ditender secara terbuka, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Apalagi, nantinya akan ada dukungan dana dari APBN. Karena itu, saya pikir ini langkah yang melanggar hukum," ujar Hilmi dalam diskusi publik bertema *Pro Korda Penunjukan Langsung* Huti-

► Tanpa tender menyalahtan aturan pengadaan barang dan jasa.

► Kasus seperti Century Jilid II dikhawatirkan terulang.

► Sudah ditandatangani beberapa kali, tak ada peminat.

ma Karya sebagai Pembangun dan Pengelola Jalan Tol yang diadakan oleh Institute For Public Trust, Rabu (13/3) di Jakarta.

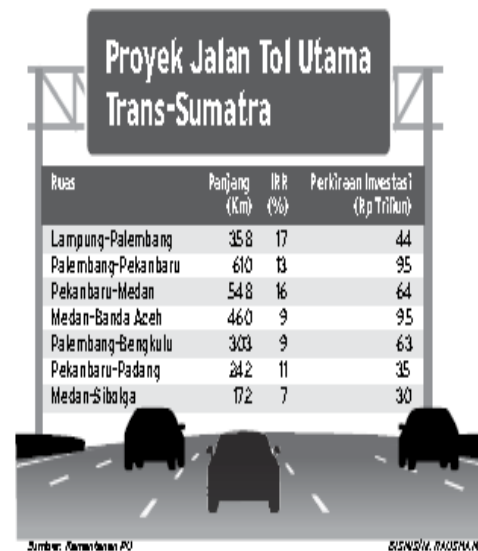
Hilmi yang juga pengamat kebijakan publik itu mengatakan kewenangan pemerintah untuk ruas jalan tol yang hanya layak secara ekonomi, namun secara keseluruhan belum layak secara finansial, adalah melakukan pendanaan, perencanaan teknis, dan melaksanakan konstruksi.

Akan tetapi, operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang pemilihannya melalui lelang, bukan penunjukan langsung.

Dengan alasan itu, rencana diterbitkannya peraturan presiden terkait penunjukan Utama Karya untuk pengusahaan jalan tol bertentangan dengan UU No. 38/2004 dan PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol.

Penunjukan langsung itu, menurut Hilmi, juga dinilai melanggar prinsip-prinsip efisiensi anggaran negara dan menutup kesempatan BUMN lainnya atau konsorsium badan usaha lainnya yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengelola jalan tol.

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) Enan Sulaeman Nasim berpendapat kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender



sangat rawan akan penyelewengan.

Dia mengatakan jika langkah ini tetap dilanjutkan, bukan tidak mungkin muncul kasus seperti Century Jilid II. "Ditambah lagi, saat ini mendekati pemilihan umum dan pemilihan presiden, di mana partai politik maupun dan partisipan pemilu dan pemilihan presiden membutuhkan dana yang amat besar."

TELAH DIKAJI

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan Utama Karya Ari Widiyanto mengatakan penunjuk-

an secara langsung tidak bertentangan dengan hukum karena perusahaan telah mengkaji UU yang memayungi pengusahan tersebut.

"Tentunya penunjukan kami ini berdasarkan UU dan peraturan yang ada serta sudah diteliti oleh pemerintah, jadi penunjukan kami itu sah," katanya kepada Bisnis, Rabu (13/3).

Dia menyampaikan perusahaan mengacu pada UU No. 38/2004 ayat 50 Pasal 5 yang berbunyi dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh

badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam keadaan tertentu, lanjutnya, seperti yang terjadi pada proyek jalan tol trans-Sumatra, mengingat proyek tersebut tidak layak secara finansial, tetapi layak secara ekonomi. "Jalan tol itu kan sudah ditenderkan beberapa kali, tapi enggak ada badan usaha yang berniat. Kalau dilihat dari IRR (*internal rate of return*)-nya saja juga di bawah 18%."

Oleh karena itu, pemerintah menunjuk langsung kepada BUMN guna mendukung perluasan infrastruktur di wilayah tersebut yang dapat mendorong perekonomian sekitar. "Kalau mau tunggu sampai layak, kapan infrastrukturnya bisa jadi?"

Selain itu, ujar Ari, dengan penunjukan perseroan tidak berarti mempersempit peluang badan usaha lainnya untuk berpartisipasi karena proses konstruksi pun akan diten-



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Priok Perlu Serius Tekan Dwelling Time	<div><div>- Bila dwelling time masih lama hingga 7 hari, upaya pemerintah menurunkan biaya logistuk akan sulit tercapai</div><div>- Sampai saat ini, dia mengungkapkan lbih dari 65% kegiatan ekspor impor dan antar pulau dikendalikan dari Pelabuhan Tanjung Priok</div></div>				PT. Pelabuhan Indonesia II	

► LAYANAN KEPELABUHANAN

Priok Perlu Serius Tekan Dwelling Time

JAKARTA—Pelaku usaha logistik menilai operator Pelabuhan Tanjung Priok belum serius menurunkan waktu tunggu pelayanan kapal dan barang atau *dwelling time* dari rata-rata 7 hari menjadi 4 hari.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Sofian Pane mengatakan *dwelling time* yang ada saat ini menjadi penyebab utama munculnya biaya tinggi. Padahal pemerintah menargetkan *dwelling time* rata-rata hanya 4 hari.

"Pelabuhan itu kan harusnya *public service*. Bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional," ujarnya kepada *Bisnis* Rabu (13/3).

Bila *dwelling time* masih lama hingga 7 hari, Sofian menilai upaya pemerintah menurunkan biaya logistik akan sulit tercapai.

Untuk itu, dia meminta pelaku usaha mendesak operator pelabuhan lebih fokus kepada pelayanan kepelabuhanan.

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok, ungkapnya, berperan besar memangkas waktu tunggu pela-

nyanan kapal dan barang guna memangkas biaya logistik nasional.

Sampai saat ini, dia mengungkapkan lebih dari 65% kegiatan ekspor-impor dan antarpulau dikendalikan dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia menilai perbaikan *dwelling time* di Priok, lanjutnya, merupakan salah satu upaya pemberahan guna menghadapi Integrasi Logistik Asean pada 2015.

Sejauh ini, biaya tinggi logistik terbesar masih disumbangkan dari pelabuhan. "Jadi kalau mau efisien, pelayanan pelabuhannya dibenahi, jangan hanya mengejar profit," katanya.

Sebagai negara yang sedang tumbuh, Indonesia menjadi pasar yang cukup menjanjikan.

Berdasarkan data, industri logistik nasional dalam 2 tahun terakhir rata-rata tumbuh di 10%-12% per tahun.

Bahkan sepanjang tahun ini, dia memprediksikan industri logistik nasional bisa tumbuh sekitar 14,5%.

"Tapi kalau pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan infrastruktur dipastikan, pertumbuhan akan terhambat. Padahal kita tahu, Priok paling dominan," ujarnya.